

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT
(Studi pada objek wisata pantai di Desa Kiluan Negeri Tanggamus)**

Erwin Putu Basai¹, M. Harviend Gilang P²

^{1,2}Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

e-mail: erwinputusabai@gmail.com

ABSTRAK

Peran pemerintah desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki nilai tambah secara ekonomi melalui pengembangan wisata pantai di Desa Kiluan Negeri. Pemerintah desa diharapkan dapat mengatur tata kelola dan memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk terlibat secara aktif dalam mengelola aset wisata tersebut agar berdampak positif dalam menambah pendapatan bagi masyarakat Desa Kiluan Negeri. Pada penelitian ini dilakukan studi analisis tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata pantai desa kiluan. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dalam konteks kualitatif, untuk lebih memahami peran yang dilakukan pemerintah desa. Penelitian yang menunjukkan bahwa peran pemerintah desa mencakup tiga fungsi utama, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan promotor. Sebagai regulator, pemerintah desa telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan peraturan desa yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata, termasuk pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pengaturan zonasi usaha di kawasan pantai. Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti akses jalan, toilet umum, tempat sampah, serta pelatihan-pelatihan usaha dan lingkungan bekerja sama dengan dinas terkait dan LSM. Peran ini terbukti membuka peluang usaha dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sektor pengembangan ekonomi pariwisata. Sebagai promotor, pemerintah desa aktif melakukan promosi wisata melalui media sosial, spanduk, dan website desa, serta mendorong keterlibatan pemuda desa dalam digital marketing wisata. Upaya promosi ini secara perlahan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal. Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata pantai di Desa Kiluan Negeri sangat signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, masih diperlukan penguatan kelembagaan dan pengembangan regulasi yang lebih inklusif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Kunci Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Pengembangan Wisata, Pemberdayaan Ekonomi

ABSTRACT

The role of the village government holds a highly strategic position in empowering the community to gain economic added value through the development of coastal tourism in Kiluan Negeri Village. The village government is expected to manage governance and provide space for village residents to actively participate in managing tourism assets so that it positively impacts the income of the people of Kiluan Negeri Village. This study conducted an analytical investigation into the role of the village government in managing coastal tourism in Kiluan Village. The method used is a descriptive approach within a qualitative context, aiming to better understand the role played by the village government. The research shows that the village government's role encompasses three main functions: as a regulator, facilitator, and promoter. As a regulator, the village government has issued various policies and village regulations that encourage community participation in tourism management, including the establishment of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) and the zoning of business areas along the coast. As a facilitator, the village

government provides supporting infrastructure and facilities, such as access roads, public toilets, trash bins, as well as business and environmental training in collaboration with relevant agencies and NGOs. This role has proven to open business opportunities and increase community involvement in the tourism economic development sector. As a promoter, the village government actively promotes tourism through social media, banners, and the village website, while also encouraging youth participation in tourism digital marketing. These promotional efforts have gradually increased the number of tourist visits and stimulated the growth of the local economy. It can be concluded that the role of the village government in the development of coastal tourism in Kiluan Negeri Village is highly significant in economically empowering the community. However, there is still a need to strengthen institutions and develop more inclusive regulations to reach economically vulnerable groups.

Keywords: *Role, Village Government, Tourism Development, Economic Empowerment*

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata dan menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat dipedesaan yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Pengembangan wisata pantai tidak lepas dari peran serta masyarakat yang juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Melalui pengembangan wisata yang lebih baik dan melibatkan masyarakat dalam hal kebijakan pengelolaan wisata dan berwirausaha di pantai wisata, tentu akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan Pemerintah Desa.

Persoalan yang muncul adalah belum adanya tata kelola pantai wisata yang jelas dan upaya pengembangan sarana dan prasarana agar wisata pantai dapat menjadi daerah wisata yang berkualitas.

Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab strategis dalam menciptakan kebijakan dan program yang terintegrasi guna mendukung pengembangan objek wisata secara berkelanjutan. Perencanaan yang matang serta keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi faktor penting agar potensi wisata tidak hanya menjadi daya tarik sementara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Pada Desa Kiluan Negeri, potensi wisata bahari, khususnya wisata pantai, sangat besar namun belum sepenuhnya terkelola secara optimal.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata

memerlukan sinergi antara kelembagaan desa, pelaku usaha lokal, dan komunitas masyarakat. Pemerintah Desa harus mampu menjadi motor penggerak yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas pengelolaan wisata berbasis komunitas yang inklusif dan partisipatif.

Desa Kiluan Negeri sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tanggamus memiliki keunikan berupa keindahan alam laut, atraksi lumba-lumba, dan potensi budaya lokal yang kuat. Namun demikian, tantangan seperti minimnya infrastruktur pendukung, akses transportasi, dan belum adanya regulasi pengelolaan wisata menjadi kendala dalam pengembangan yang berkelanjutan. Dari potensi yang dimiliki, peran Pemerintah Desa menjadi penting dalam merancang tata kelola wisata yang berpihak pada kepentingan masyarakat setempat. Upaya penguatan ekonomi masyarakat melalui pariwisata juga perlu didukung dengan kebijakan yang mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) di sektor wisata. Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis), koperasi wisata, serta pelatihan kewirausahaan yang relevan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan ekonomi berbasis wisata.

Peran Pemerintah Desa dalam mengoordinasikan lintas sektor seperti lingkungan hidup, sosial budaya, dan keamanan sangat penting dalam memastikan wisata pantai tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga lestari secara ekologis. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan kerangka yang harus diadopsi dalam setiap langkah pemberdayaan yang dilakukan di desa wisata seperti Kiluan Negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui sektor wisata pantai, tantangan yang dihadapi, serta strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan studi lapangan, tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi

terhadap model pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks pengembangan wisata lokal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan peran pemerintah desa untuk mengupayakan pengembangan wisata yang memberikan dampak positif dan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat. Pada penelitian ini dilakukan studi analisis peran pemerintah dengan menggunakan indikator peran sebagai fasilitator, regulator, promotor, dan koordinator yang diterapkan oleh pemerintah Desa Kiluan Negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses menyelidiki fenomena sosial dan masalah yang ada dimasyarakat. Penelitian kualitatif memosisikan peran peneliti sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan

menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, sehingga dapat mengungkapkan fakta dan mengaji berdasarkan teori Peranan Pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini, untuk selanjutnya dibuat kesimpulan dan saran dalam konteks mengintervensi fenomena yang diteliti secara teoritis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Beberapa peraturan Pemerintah Desa Kiluan Negeri telah dibuat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) yang terdiri dari anggota masyarakat desa, dengan kewenangan untuk mengelola, mengatur dan menjaga kelestarian Pantai agar pantai wisata bisa beroperasi secara tertib, aman dan lestari, sehingga memberi kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Dengan pembentukan Pokdarwis ini sebagai pengelola wisata pantai, maka pemerintah desa telah membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat desa.

Kemudian pemerintah desa juga telah mengeluarkan peraturan mengenai masyarakat dapat berdagang dengan membuka kios-kios berupa pondok yang tidak permanen, berbahan kayu dan bambu, dan tidak berada ditepi pantai. Di bagian pantai masyarakat desa juga dapat membuat pondokan yang juga tidak permanen dan berlokasi agak ditepi pantai, yang dapat disewakan kepada wisatawan. Dalam beberapa hal regulasi tersebut sudah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berwirausaha di pantai wisata desa, namun regulasi tersebut belum di buat secara lebih mendetil, seperti apa kategori masyarakat yang dapat berdagang di pantai. Hal ini cukup penting jika ditinjau dalam perspektif pemberdayaan ekonomi, maka perlu ada kategorisasi masyarakat yang bisa berdagang di kawasan pantai, perlu di buat regulasi kategorisasi masyarakat yang boleh berdagang.

Dalam hal pembuatan regulasi ini pemerintah desa juga telah melakukan urun rembuk dengan melibatkan masyarakat, sehingga regulasi yang ada telah mengakomodir keinginan masyarakat desa, hanya saja perlu dikaji lebih mendalam lagi dengan berdasarkan kepada landasan untuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang

berpenghasilan rendah di desa Kiluan Negeri.

Pemerintah Desa Kiluan Negeri telah menunjuk perangkat desa tertentu sebagai pengawas lapangan untuk memastikan bahwa peraturan yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten. Kehadiran pengawas ini menjadi penting untuk mengontrol potensi pelanggaran, seperti pendirian kios permanen atau praktik dagang yang tidak sesuai aturan. Sistem pengawasan yang lebih terpadu diperlukan agar implementasi peraturan tidak hanya bergantung pada individu, melainkan berbasis kelembagaan yang kuat dan transparan. Hal ini akan memberikan rasa keadilan serta menjamin keberlanjutan usaha masyarakat di sekitar pantai wisata.

Upaya partisipatif dalam merumuskan kebijakan, pelibatan masyarakat miskin atau kelompok rentan sering kali masih bersifat simbolis. Mereka yang memiliki modal dan akses informasi lebih cenderung menguasai peluang usaha wisata, sementara masyarakat dengan keterbatasan ekonomi belum memperoleh afirmasi yang cukup. Regulasi lanjutan sebaiknya mencantumkan ketentuan afirmatif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan

rendah agar dapat mengakses peluang ekonomi secara adil. Hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan yang menekankan pada perlindungan dan penguatan kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Mekanisme perizinan usaha kecil yang sederhana dan murah agar masyarakat tidak terbebani prosedur yang rumit. Pemberlakuan retribusi, misalnya, harus proporsional dan tidak mematikan semangat berwirausaha masyarakat desa. Dalam hal ini erat kaitannya dengan regulasi ekonomi yang ramah terhadap pelaku usaha kecil sangat penting guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif di kawasan wisata pantai. Pendekatan ini juga bisa menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberdayakan masyarakatnya secara langsung di tingkat desa.

Pemerintah Desa dapat menginisiasi pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan wisata bagi pelaku usaha lokal. Pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat agar mampu bersaing secara sehat dan profesional di sektor pariwisata. Kerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, atau pihak

swasta dapat menjadi alternatif strategi untuk penguatan kapasitas masyarakat desa. Dengan penguatan sumber daya manusia ini, keberlanjutan wisata pantai akan semakin terjamin, karena masyarakat tidak hanya menjadi pelaku pasif, tetapi juga penggerak utama.

Rregulasi yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Kiluan Negeri merupakan langkah awal yang positif dalam mengarahkan pengelolaan wisata yang partisipatif dan berkeadilan. Diperlukan penguatan kelembagaan serta pemetaan sosial-ekonomi masyarakat, dan evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi. Proses ini harus terus didorong agar pembangunan wisata benar-benar berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa, bukan hanya sebagai proyek ekonomi sesaat.

B. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah desa telah memberikan dukungan sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan, penyediaan toilet umum, area parkir, saung, dan tempat sampah di sekitar Pantai, fasilitas diberikan untuk menunjang keamanan dan nyaman dari pengunjung dan mendukung kegiatan dari pelaku usaha

di sekitar Pantai. Upaya dalam mendorong ekonomi lokal dengan mendukung usaha kecil berbasis Pantai, seperti kantin, penyewaan alat renang dan pengolahan hasil laut. Dalam penguatan kapasitas, pemerintah desa telah melakukan kerja sama dengan dinas terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan pelatihan lingkungan dan usaha berbasis wisata.

Penyediaan fasilitas yang diberikan pemerintah desa sudah cukup baik dalam menunjang kegiatan wirausaha masyarakat desa, dan fasilitas tersebut perlu dipertahankan dan dijaga dengan memberikan kesadaran bagi masyarakat yang berwirausaha agar fasilitas tersebut tetap dalam kondisi yang baik agar akses jalan, dan fasilitas yang digunakan oleh pengunjung di pantai wisata tersebut tetap dalam kondisi yang layak digunakan sehingga kenyamanan pengunjung wisata pantai tetap terjaga. Hal ini sangat penting untuk dipertahankan dengan harapan dapat menambah jumlah wisatawan yang berkunjung. Perlu dilakukan kegiatan gotong royong terjadwal bagi masyarakat untuk menjaga, memperbaiki, dan menambah fasilitas yang sudah ada.

Untuk menjaga keberlangsungan fasilitas tersebut, Pemerintah Desa perlu menyusun sistem pengelolaan yang terstruktur dan melibatkan kelompok masyarakat secara langsung. Salah satu langkah strategis adalah membentuk tim pengelola sarana prasarana yang bertugas melakukan pemeliharaan rutin, identifikasi kerusakan, dan pelaporan kebutuhan perbaikan kepada pemerintah desa. Dengan adanya tim, pengelolaan fasilitas dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir kerusakan yang dapat mengganggu kenyamanan wisatawan maupun aktivitas pelaku usaha lokal di sekitar pantai.

Pemerintah Desa perlu membangun budaya sadar lingkungan dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat pelaku usaha selain aspek fisik. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan, mematuhi aturan zonasi usaha, serta penggunaan fasilitas secara bijak harus dilakukan secara berkala. Kegiatan-kegiatan ini dapat dimasukkan dalam agenda rutin desa, misalnya melalui forum warga atau pertemuan Pokdarwis, agar menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan wisata pantai.

Pemerintah Desa juga bisa menginisiasi sistem insentif bagi pelaku usaha atau kelompok masyarakat yang aktif berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan fasilitas umum. Insentif ini dapat berupa keringanan retribusi, bantuan alat usaha, atau promosi usaha mereka melalui media sosial resmi desa. Dari hal tersebut, masyarakat akan semakin terdorong untuk terlibat aktif dalam perawatan fasilitas sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas.

Kegiatan gotong royong yang telah disebutkan sebelumnya sangat penting untuk terus dibudayakan sebagai bentuk partisipasi nyata warga dalam pembangunan. Jadwal gotong royong yang rutin dan melibatkan seluruh unsur masyarakat akan mempererat hubungan sosial sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap fasilitas yang tersedia. Selain itu, kegiatan ini bisa dijadikan momen untuk menampung aspirasi warga terkait pengembangan wisata, sehingga pembangunan wisata pantai di Desa Kiluan Negeri tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi benar-benar berakar dari kebutuhan dan semangat masyarakat setempat.

C. Peran Pemerintah Desa Sebagai Promotor

Peran promotor yaitu dikaitkan dengan promosi Pantai Kiluan Negeri, pemerintah desa telah melakukan berbagai kegiatan promosi dan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik minat pengunjung tanpa mengesampingkan aspek- aspek dari pelestarian lingkungan Pantai itu sendiri.

Strategi promosi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan cara mengkampanyekan keberadaan pantai wisata melalui sosial media, spanduk dan juga website desa. Peran pemerintah dalam mendukung promosi wisata yaitu dengan cara menggandeng anak-anak muda melalui komunitas dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Di era digital ini promosi yang lebih luas bisa dilakukan secara maksimal dengan berbasis jejaring sosial media. Beberapa akun sosial media, mungkin perlu dijadikan pertimbangan bagi desa dalam memromosikan objek wisata. Kegiatan sosial media bukanlah hal yang baru bagi generasi muda didesa Negeri Kiluan. Hanya diperlukan pelatihan yang lebih intensif dalam konsep digital marketing bagi beberapa

anggota pokdarwis sehingga melalui akun sosial media tersebut mereka dapat membranding pantai wisata dengan cakupan yang lebih luas dan mudah.

Pemerintah desa dapat menjalin kerja sama dengan influencer lokal maupun regional yang memiliki pengikut aktif di media sosial untuk mempromosikan Pantai Kiluan Negeri. Kolaborasi semacam ini terbukti mampu menarik perhatian publik secara cepat dan efektif. Sejalan dengan itu, pemerintah desa dapat membuat konten visual yang menarik seperti video pendek, vlog wisata, dan foto-foto panorama pantai yang dikemas secara profesional. Konten-konten ini akan sangat membantu dalam membangun citra positif destinasi wisata dan meningkatkan daya tariknya di mata calon wisatawan dari luar daerah.

Untuk memperkuat dampak promosi digital, penting pula bagi pemerintah desa dan Pokdarwis mengoptimalkan penggunaan platform seperti Google Maps, TripAdvisor, dan aplikasi perjalanan lainnya. Hal ini bertujuan agar Pantai Kiluan Negeri mudah ditemukan oleh wisatawan dan memperoleh ulasan yang positif. Dengan pengelolaan ulasan dan tanggapan yang baik, maka reputasi pantai dapat terus

dijaga. Keberadaan informasi lengkap di platform digital juga membantu wisatawan dalam merencanakan kunjungan mereka dengan lebih baik, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain promosi eksternal, promosi internal atau edukasi kepada masyarakat lokal juga penting dilakukan. Masyarakat perlu memahami bahwa mereka adalah bagian dari daya tarik wisata itu sendiri, sehingga perilaku, keramahan, dan kebersihan lingkungan menjadi bagian penting dari strategi promosi. Pemerintah desa dapat mengadakan pelatihan layanan wisata, pelatihan bahasa asing dasar, serta tata kelola penginapan atau homestay sederhana agar masyarakat siap menerima dan melayani tamu dengan baik. Hal ini akan memperkuat citra Pantai Kiluan Negeri sebagai destinasi yang ramah dan berkesan.

Keberhasilan promosi wisata pantai tidak hanya terletak pada besarnya anggaran promosi, tetapi juga pada konsistensi dan kolaborasi. Pemerintah Desa Kiluan Negeri perlu memastikan bahwa strategi promosi berjalan berkelanjutan dan terus dievaluasi dampaknya. Penetapan kalender event tahunan seperti festival pantai, lomba

fotografi, atau pertunjukan budaya juga bisa menjadi sarana promosi langsung yang efektif, sekaligus memperkuat identitas lokal. Dengan promosi yang terencana, kolaboratif, dan partisipatif, Pantai Kiluan Negeri berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan yang memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya setempat.

D. Peran Pemerintah Desa Sebagai Koordinator

Peran pemerintah sebagai Koordinator lebih menekankan sebagai aktor yang mengkoordinasikan kepentingan antara Pokdarwis sebagai penyelenggara dan petugas pengelola pantai wisata, dengan masyarakat yang melakukan kegiatan wirausaha, serta kepentingan para wisatawan, dan pihak lain yang memiliki kepentingan atau mitra, serta pemerintah kecamatan atau kabupaten yang kesemuanya diarahkan untuk menunjang keberlangsungan objek wisata pantai.

Pemerintah Desa telah menunjukkan hasil positif dalam menjalin koordinasi dengan berbagai pihak sehingga keberlanjutan kegiatan pantai wisata sampai saat ini masih cukup kondusif dan terus berjalan, bahkan menunjukkan kecenderungan

peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata tersebut. Pengembangan objek wisata pantai masih bisa dikembangkan jika pemerintah desa bisa menjalin koordinasi dengan pihak swasta dan didampingi dengan pemerintah kabupaten sehingga objek wisata pantai bisa memiliki dan menambah fasilitas wisata yang lebih banyak. Diantaranya belum ada cottage, ataupun bangunan yang bisa dijadikan sebagai tempat menginap bagi wisatawan, kemudian wahana wisata bermain yang lebih kekinian dan trend pada tempat wisata lain bisa dihadirkan di objek wisata pantai Negeri Kiluan, dengan harapan semakin banyak sarana dan prasarana yang ada bisa menambah jumlah wisatawan.

Untuk melakukan hal ini tentu peran pemerintah desa harus lebih banyak berkordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga dengan semakin baiknya objek wisata akan menambah jumlah pengunjung, yang pada akhirnya bisa menambah income bagi masyarakat desa Negeri Kiluan.

KESIMPULAN

Dalam Pemerintah Desa Kiluan Negeri dalam menjalankan peran regulator, fasilitator, promotor, dan

koordinator, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui objek wisata pantai yang ada di desa telah mendorong terbentuknya sistem pengelolaan wisata yang partisipatif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Objek wisata pantai tersebut telah memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi. Objek wisata pantai juga telah menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap tenaga kerja lokal, dan menambah keterampilan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang mendukung pengelolaan wisata yang ramah lingkungan. Bantuan modal usaha juga telah diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas berdagang dan saung yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Dalam proses pengelolaan objek wisata ini, seiring dengan waktu maka kedepannya bisa diharapkan peran pemerintah desa yang lebih baik lagi dalam mengembangkan objek wisata pantai Desa Kiluan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmanto, A, *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Surakarta: sebelas Maret University Press
- Gunawan, Imam. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Kartasasmita Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta
- Sugiyono, 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta
- Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Yusuf, Iyas. 2014, *Peran dan Fungsi Pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat*, Jakarta